#### TEMPAT PEMILAHAN SAMPAH DI BANARAN GALUR

# DLH Layangkan Teguran, Pengelola Diminta Hentikan Aktivitas

PENGASIH (KR) - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kulonprogo, Ir Gusdi Hartono menegaskan, pihaknya telah menindaklanjuti laporan soal kegiatan pemilahan sampah di Padukuhan Sawahan, Kalurahan Banaran, Kapanewon Galur, Kulonprogo.

"Kami telah menerjunkan tim khusus untuk mendalami permasalahan tersebut. Kaitan aduan masyarakat di Kalurahan Banaran, di sana terjadi tempat penimbunan sampah dari luar kota. Nah ini terus terang ketika mendengar laporan tersebut sekaligus diundang rapat di kalurahan, kami datangkan dari lini bidang persampahan dan kedua dari lini pengendalian dan pengawasannya," kata Gusdi, Rabu (5/2).

Diungkapkan, hasil pemeriksaan di lokasi, diketahui tempat pemilahan sampah tidak memenuhi unsur pengolahan sampah yang berwawasan lingkungan. Selain itu juga tidak mengantongi izin. "Secara aturan dikatakan bahwa setiap warga negara punya kewajiban mengelola sampah berwawasan lingkungan. Sedangkan pengolahan sampah di Banaran itu tidak berwawasan lingkungan," tegasnya.

"Dari hasil laporan tim, memang benar di sana ada truk-truk untuk tempat pembuangan sampah dari luar kota. Ini sangat disayangkan dan dipertanyakan tentang proses perizinan, yang ternyata belum dilakukan. Apalagi kalau nanti proses izin dilakukan pasti melewati DLH," tutur

Lebih lanjut Gusdi menegaskan, pihaknya telah melayangkan surat teguran kepada pihak pengelo-



Petugas Kepolisian, DLH dan Kalurahan serta pihak terkait melakukan pengecekan lokasi tempat pemilihan sampah di Padukuhan Sawahan, Banaran.

la sampah agar segera menghentikan aktivitasnya. Pemilahan boleh dilakukan dengan catatan sudah mengantongi izin.

"Kami melayangkan surat kepada pengelola untuk segera menghentikan proses kegiatan. Soal izin acc tidak itu soal nanti. Karena perizinan kan panjang. Perlu kajian, sosialisasi masvarakat, masyarakat setuju tidak,

jalur lingkungan benar tidak, pengolahan sampah benar tidak itu di proses perizinan. Kami tidak bisa mengatakan o itu gak boleh, artinya urus izin

goal, ya silakan," terang-

Gusdi menegaskan, jika surat teguran tidak diindahkan oleh pengelola tempat pemilahan sampah maka DLH akan meminta bantuan Satpol PP untuk menindak tempat tersebut. "Kalau tidak diindahkan maka kami undang seluruh OPD terkait khususnya Sat Pol PP karena tentang pengendalian sampah sudah ada Perdanya dan ini melanggar Perda. Sehingga otomatis Pol PP bertindak," kata Gusdi.

Dalam penanganan permasalahan pengelola tempat pemilahan sampah tersebut, jajaran Polsek Galur juga telah melakukan pengamanan kegiatan serap aspirasi pengelolaan sampah bertempat di Aula Kalurahan Banaran, Galur.

"Petugas Polsek Galur telah ikut menghadiri serap aspirasi pengelolaan samdulu. Ketika proses izin pah terkait adanya tanah

pekarangan warga milik Yusuf di Padukuhan Sawahan, Banaran, Galur digunakan sebagai tempat sampah," kata Kasi Humas Polres Kulonprogo, Iptu Sarjoko.

Selain petugas Kepolisian ungkapnya hadir pula dari DLH Kulonprogo, Panewu Galur. Serap aspirasi diikuti 30 orang warga Padukuhan Sawahan.

Selesai serap aspirasi, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan atau cek lokasi tempat pembuangan/ pengelolaan sampah di Sawahan, Banaran, Galur," je-

"Dalam giat tersebut Kapolsek Galur bersama anggotanya melaksanakan pendampingan dan pengamanan agar kegiatan berlangsung kondusif serta mengimbau warga dalam menyampaikan aspirasi agar dilakukan dengan damai," tutur Iptu (Ru/Dan)

#### LAGI, BPBD USULKAN PERPANJANGAN STATUS

### Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi

Kedaruratan dan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo, Budi Prastawa menjelaskan, badan tersebut mengusulkan kembali perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi. Status tersebut telah diberlakukan sejak Desember 2024

"Saat ini usulan perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi tersebut masih dalam proses di Pemkab Kulonprogo," katanya, Rabu (5/2).

BPBD menilai status tanggap darurat perlu diperpanjang karena potensi kerawanan bencana masih tinggi. Apalagi dengan adanya prakiraan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dampak siklon tropis.

"Sembari menunggu persetujuan dari pemkab, kami melakukan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana. Terutama dari sisi tenaga hingga peralatan. Kami selalu siaga dengan mengarahkan

PENGASIH (KR) - Kepala Seksi (Kasi) rekan-rekan Tim Reaksi Cepat (TRC) jika sewaktu-waktu terjadi bencana," jelasnya. Selain menyiapkan petugas dan peralatan, BPBD juga mengimbau masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan. Terutama mereka yang tinggal di wilayah rawan bencana agar lebih peka terhadap kondisi sekitar.

> Secara terpisah Sekda Kulonprogo, Triyono SIP memastikan seluruh kesiapan dalam menghadapi potensi bencana dampak siklon tropis. Menurut prakiraan BMKG, dampak siklon tropis berpotensi terjadi, Kamis (6/2).

Ditegaskan, anggaran dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Kulonprogo siap digelontorkan jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk penanganan bencana. Apalagi sudah ada Surat Keputusan (SK) Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi sebagai dasar hukumnya. "Kami berharap mudah-mudahan dampak siklon tropis tidak terjadi di wilayah Kulonprogo," harapnya.

#### DIPERSIAPKAN PELANTIKAN

## Bupati-Wabup Terpilih Beserta Sertijabnya

WATES (KR) - Daerah yang tidak yono SIP MSi, Rabu (5/2) usai mengada sengketa Pilkada dan sengketanya ditolak (dismissal), pelantikannya akan dilakukan serentak rencananya pada 20 Februari 2025. Pelantikan kepala daerah terpilih akan dilakukan langsung oleh Presiden di Istana Negara, namun belum dijelaskan secara rinci apakah di Jakarta atau Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. "Pemkab Kulonprogo mulai melakukan berbagai persiapan untuk pelantikan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) terpilih hasil Pilkada 2024. Persiapan lebih banyak sebab proses pelantikan berbeda dari sebelumnya," ujar Sekda Kulonprogo Tri-

ikuti rapat koordinasi (rakor) secara virtual dengan berbagai daerah bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Pemkab Kulonprogo perlu melakukan persiapan yang lebih banyak, sebab selama ini pelantikan dilakukan di Komplek Kepatihan Pemda DIY dan dilakukan oleh Gubernur DIY. "Karena bukan di DIY maka harus mempersiapkan akomodasi, jadwal keberangkatan, dan siapa saja yang nanti ikut serta dalam acara pelantikan," kata Triyono.

Menurutnya, pihaknya harus menyiapkan atribut pelantikan, termasuk penginapannya. Setelah pelantikan, masih ada proses serah terima jabatan (sertijab) yang harus dilakukan di Wates sebagai ibukota kabupaten. Sertijab dilakukan antara Bupati dan Wabup terpilih dengan Penjabat (Pj) Bupati. Tahap terakhir adalah Rapat Paripurna Penetapan Bupati dan Wakil Bupati di DPRD Kulonprogo. "Kami harus pula menyiapkan antisipasi bila ada perubahan di tengah jalan," ucapnya sambil menambahkan bahwa

jadwal pelantikan 20 Februari 2025 masih belum dipastikan. Karena pemerintah perlu berkoordinasi dengan DPR untuk persetujuan tanggal pe-

### DAMPAK INPRES NOMOR 1/2025 Kulonprogo Pusing, Sebagian Besar Program Vital Tertunda

WATES (KR) - Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berdampak tertundanya pelaksanaan sebagian besar program vital di Kabupaten Kulonprogo.

Melalui inpres tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto memangkas Dana Transfer ke Daerah Rp 50 triliun lebih. Selain itu, Dana Keistimewaan (Danais) DIY turut dipangkas sampai Rp 200 miliar, dari yang sebelumnya Rp 1,2 triliun. Kebijakan Presiden Praboowo tersebut berimbas pada operasional hingga pelaksanaan program pembangunan di Kulonprogo.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo, Triyono MSi mengatakan, nominal dana transfer dari pusat yang dipangkas cukup besar. "Pengurangannya sekitar Rp 53 miliar dari total Rp 1,1 triliun," katanya di Kompleks Pemkab setempat, Selasa (4/2).

Triyono merinci, dana transfer dari pusat dimaksud meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU),dan Bagi Hasil. Pengurangan tersebut membuat dana Bagi Hasil tidak turun ke daerah. Selain itu, DAK dan DAU untuk program perbaikan infrastruktur, sekarang jadi 'hilang'akibat pengurangan tersebut.

Padahal Pemkab Kulonprogo sudah mengalokasikan dana tersebut untuk perbaikan sejumlah jalan yang kondisinya rusak. "Yang jelas ada pengurangan belanja perjalanan dinas sampai 50 persen, termasuk untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)," ungkap Sekda Triyono.

Di sisi lain pemangkasan Danais DIY berimbas pada porsi alokasi untuk Kulonprogo. Jika sebelumnya, alokasi Danais untuk Kulonprogo mencapai Rp 103 miliar, paling besar dibandingkan kabupaten/kota lainnya di DIY.

## MEDIA INFORMASI & HIBURAÑ

# High Light IR Radio

- Sewarna
- **Bening Hati**
- Nuansa Gita
- Sang Legenda
- **Sweet Memories**
- Digoda
- **Beatles Mania**
- Soneta
- **Pariwara** 
  - **Wayang Kulit &** Cakruk

 $Siswa\ SMAN\ 1\ Temon\ memanfaatkan\ stan-stan$ yang ada untuk meminta informasi seputar perguruan tinggi dan lowongan keria.

**TEMON (KR) -** Kepala SMA N 1 Temon, Lestari Asih Partiwi menjelaskan, kegiatan Edu Expo 2025 bertemakan Wujudkan Harapan Meraih Masa Depan' sangat penting dalam menyiapkan masa depan anak-anak. "Sesuai tema, anak-anak bisa meminta informasi terkait program studi, peluang kerja hingga biaya pendidikan. Hal ini

sangat penting agar anakanak bisa membuat rencana untuk melanjutkan pendidikan tinggi agar bisa meraih harapan yang lebih cerah. Anak-anak bisa meminta informasi lengkap sebagai modal untuk meraih masa depan," katanya di sela acara, Rabu (5/2).

GELAR EDU EXPO SMAN 1 TEMON

Siswa Harus Berkarakter dan Etos Kerja

Edu Expo 2025 mengundang 27 perguruan tinggi dan swasta serta Balai

Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja Kulonprogo. ìEdu Expo diikuti 25 perguruan tingga swasta dan dua PTN dan BLK dari Disnaker Kulonprogo," jelasnya. Secara simbolis, Edu Expo 2025 dibuka perwakilan dari Balai Pendidikan Menengah Kulonprogo, Fajrina Sulistyowati. "Kegiatan serupa harus dilaksanakana setiap tahun, karena bisa menjadi penentuan masa depan anak dalam meraih cita-cita. Tahun depan kampus yang ikut harus lebih banyak lagi," imbaunya.

Lebih lanjut Fajrina mengungkapkan, siswa harus disiplin dan memiliki etos kerja. Apalagi saat ini angka pengangguran cukup tinggi. Permasalahan bukan pada ketersediaan lapangan kerja, tapi juga pada permasalahan pencari kerja. (Rul)

### **PEMASARAN:**

JI. Margo Utomo / P. Mangkubumi No. 40 - 146 Jogjakarta Telp./Fax.: 0274 550 891 STUDIO:

Jl. Veteran No. 16 Wates Kulon Progo D.I.Yogyakarta